

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang belum memiliki legalitas resmi meskipun kewajiban pendaftaran telah diatur dalam Pasal 37. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, khususnya terkait mekanisme pendaftaran dan pembinaan LKS, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Pada variabel komunikasi, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya telah melakukan sosialisasi dan koordinasi yang cukup baik dengan LKS yang telah terdaftar, tercatat terdapat 46 LKS yang telah berizin, namun belum menjangkau secara merata LKS yang belum memiliki legalitas. Pada variabel sumber daya, Dinas Sosial memiliki kapasitas yang cukup memadai baik dari segi jumlah aparatur maupun dukungan kelembagaan, meskipun masih terdapat ketimpangan kemampuan administratif pada sebagian LKS. Pada variabel disposisi pelaksana, implementasi cenderung dilakukan secara persuasif melalui pembinaan tanpa diiringi penegakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, sehingga melemahkan daya paksa kebijakan. Sementara itu, pada variabel struktur birokrasi, prosedur dan standar operasional telah tersedia dan berjalan cukup baik, meskipun masih dirasakan berbeda tingkat kemudahannya oleh masing-masing lembaga. Dengan demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan tertib administrasi LKS di Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Tata Kelola Daerah.

ABSTRACT

This study focuses on the analysis of the implementation of Tasikmalaya City Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning Social Welfare Institutions (LKS), motivated by the fact that some LKS have not yet obtained official legal status, even though the registration requirement is stipulated in Article 37. This condition indicates a gap between the normative provisions of the policy and its implementation in the field. The study employs George C. Edwards III's policy implementation theory, which emphasizes four main variables: communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure.

The study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2017 by the Tasikmalaya City Social Service, particularly regarding the registration and guidance mechanisms for LKS, as well as to identify supporting and inhibiting factors. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was tested through source and technique triangulation.

The results indicate that policy implementation has been carried out, but not optimally. In terms of communication, the Tasikmalaya City Social Service has conducted fairly good socialization and coordination with registered LKS—there are 46 LKS that have obtained official permits—but it has not yet reached LKS without legal status evenly. Regarding resources, the Social Service has adequate capacity in terms of both the number of personnel and institutional support, although there are still administrative capability gaps among some LKS. In terms of implementers' disposition, the implementation tends to be carried out persuasively through guidance without the enforcement of administrative sanctions as stipulated in the regulation, thereby weakening the policy's coercive power. Meanwhile, regarding bureaucratic structure, procedures and operational standards are available and functioning fairly well, although the ease of implementation is perceived differently by each institution. Thus, the policy implementation has not yet been fully effective in achieving orderly administration of LKS in Tasikmalaya City.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation, Social Welfare Institutions, Local Governance.